

TEORI KEBENARAN PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU¹

Oleh: *Budisutrisna*²

Abstract

Science, by its method, wants to get truth. Science is a human creation; the truth does not only to fulfill correspondence-coherence criteria of truth, induction-deduction, and empirical-rational thought. The truth and science developing in Indonesia also must be back to mankind, Indonesian identity. Pancasila theory of truth consists of correspondence, coherence, and pragmatic that all of those are complemented simultaneously in scientific work. The developing of science in Indonesia must be based on Pancasila values. For Pancasila, the scientific truth must coherent to god, humanity, one, people, and justice values.

Keywords: *Pancasila, theory of truth, mankind, developing of science*

A. Pendahuluan

Bagi setiap ilmuwan ada kewajiban untuk mengarahkan segenap kegiatan ilmiahnya sampai kepada tujuan umum yang hendak dicapai oleh setiap ilmu. Tujuan tersebut adalah memperoleh kebenaran ilmiah dan sedapat mungkin juga mencapai atau meningkatkan kebahagiaan umat manusia.

Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu di Indonesia, maka perlu dikaji kebenaran yang khas menurut Pancasila terlebih dahulu. Sebab Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara akan selalu menjadi ukuran bagi setiap sikap dan perbuatan, termasuk kegiatan para ilmuwan dengan produk ilmunya.

Terkait dengan masalah kebenaran, sejak dahulu selalu menyertai setiap kegiatan ilmiah. Hal yang demikian ini karena pada ilmu, baik sebagai satu sistem maupun proses senantiasa ditujukan untuk mencapai kebenaran. Secara historis dapat diketahui, bahwa dalam

¹ *Disajikan sebagai Makalah Pendukung dalam Seminar Nasional Mengenang Satu Abad Kelahiran Prof. Notonagoro dengan Tema Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yang Diselenggarakan pada 1 Februari 2006 di Balai Senat UGM, Yogyakarta*

² *Dosen Fakultas Filsafat UGM*

hal kebenaran sudah ada tiga paham tradisional yang besar, yaitu paham koherensi, korepondensi, dan pragmatik. Tetapi timbul masalah lain, yaitu seandainya hendak berpikir secara sistematis sekaligus sintetik, maka kiranya ketiga macam paham tersebut dapat dipadukan dalam satu kerangka yang seluas-luasnya. Sehingga diharapkan dapat merangkum segenap paham yang lain (Soejono Soemargono, 1983 a: 1).

B. Pengertian Ilmu

Perkembangan ilmu amat pesat sejak revolusi pemikiran yang membawa dampak pada revolusi industri di Eropa pada abad XVIII-XIX. Perubahan dan perkembangan pada pemikiran keilmuan itu bukanlah satu saat yang datang mendadak, melainkan telah diawali oleh berbagai pemikiran pada filsuf jauh sebelumnya. Diawali oleh Roger Bacon (1274-1292), kemudian dilanjutkan oleh Francis Bacon (1561-1626) telah mengembangkan metode induksi yang pada saatnya menjadi metode kuantitatif. Perkembangan pemikiran ini mendapat coraknya sebagai pemikiran keilmuan yang dilihat setelah metode induktif yang kemudian berkembang menjadi metode eksperimen di abad XVIII yang mencapai puncaknya pada abad XIX. Pemikiran keilmuan yang semula menjadi pemikiran para filsuf pada abad ini mulai dikembangkan secara profesional oleh para ilmuwan. Ilmu kealaman yang semula merupakan filsafat alam, setelah menemukan metode ini kemudian memisahkan diri dari induknya yaitu filsafat, yang di waktu kemudian diikuti oleh cabang ilmu lainnya (Mintaredja, 1997: 19).

Selanjutnya Abbas Hamami Mintaredja (1983: 63) dalam diktat yang berjudul *Epistemologi* mengetengahkan bahwa ilmu atau science dalam bahasa Inggrisnya, berasal dari bahasa latin *scientia* yang diturunkan dari kata *scire*, yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwayuhan arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti diturunkan dari kata *scire* sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses.

Ilmu sebagai hasil kegiatan, seperti yang diutarakan oleh John Ziman (1988: 8), bahwa ilmu jelas merupakan satu hasil ciptaan sadar manusia, dengan sumber historis yang didokumentasikan secara baik, dengan lingkup dan kandungan yang dapat ditentukan secara pasti, dan dengan orang profesional terpercaya yang mempraktikkan serta menguraikannya. Ilmu bersifat tepat, metodelis, akademis, logis, dan praktis. Kemudahan yang diberikan ilmu kepada manusia, berupa pemahaman yang jelas dan melihat segala sesuatu secara jeli, membuat manusia merasa bahwa alat itu sendiri nyata, sukar, dan pasti. Dengan demikian dapatlah dikatakan secara singkat bahwa itulah hakikat ilmu.

Dalam kaitannya dengan ilmu sebagai hasil atau produk, Soejono Soemargono (1983 b: 1) memberikan tiga penafsiran yang dapat diberikan terhadapnya. Penafsiran pertama, istilah ilmu dapat disamakan pengertiannya dengan istilah Belanda *Wetenschap*. Jika diartikan secara demikian berarti bahwa istilah ilmu itu mendapatkan isi pengertian yang seluas-luasnya, karena mencakup segenap pengetahuan yang mana pun juga yang tersusun atau terkumpul secara sistematis. Dalam hal ini termasuk juga segenap pengetahuan yang biasanya digolongkan ke dalam apa yang tidak termasuk dalam istilah *science* yang biasanya diartikan sebagai ilmu teoritik atau positif.

Penafsiran yang kedua, istilah ilmu dapat juga diartikan sebagai apa yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah *science*. Jika orang menggunakan istilah *science*, maka lazimnya yang termasuk di dalamnya hanyalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, yang bahannya terdapat di luar diri manusia, yaitu kenyataan objektif, atau hal yang bersifat empiris, atau hal yang bersifat positif.

Ketiga, istilah ilmu dapat juga dipakai untuk menunjuk pada sekumpulan pengetahuan yang sesungguhnya sudah siap dipakai atau *applied science*. Dalam hal ini orang seringkali juga menggunakan istilah dalam bahasa Inggris *discipline*.

Dalam penulisan ini pembahasan tentang ilmu lebih dcondongkan kepada *science* sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa ilmu adalah sekelompok pengetahuan yang teratur secara sistematis tentang sesuatu hal (objek) tertentu, yang

ditelaah dengan metode tertentu yang khas sampai pada kebenaran yang diharapkan (Mintaredja, 1983: 64).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengetahuan (*knowledge*) itu lain dengan ilmu (*science*). Namun demikian pengetahuan dapat ditingkatkan menjadi ilmu, asalkan memenuhi syarat ilmiah. Sehingga ilmu itu merupakan kumpulan pengetahuan yang memiliki syarat ilmiah, yakni: objek, sistematis, metodik, dan berlaku universal.

Setiap ilmu harus memiliki objek, baik objek formal maupun material, yang dimaksud objek material adalah sesuatu hal yang ingin dikaji, sedangkan objek formal adalah sudut pandang atau “kaca mata” yang dipakai untuk mengkaji. Ilmu yang satu dengan ilmu yang lain berbeda justru terletak pada objek formalnya. Objek material dapat sama, tetapi yang membedakan adalah objek formalnya.

Satu ilmu harus bersistem. Artinya harus merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dari kesatuan ini mempunyai bagian-bagian yang saling berhubungan interrelasi maupun hubungan interdependensi, secara keseluruhan yang bulat.

Setiap ilmu juga memiliki metode sendiri-sendiri. Satu jalan atau cara untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan. Akhirnya, kebenaran satu ilmu harus bersifat universal, artinya berlaku di sembarang tempat, ruang, dan waktu.

Demikianlah pembahasan tentang pengertian ilmu, terutama dari segi hasil atau produk, yang sesungguhnya dari salah satu syarat ilmiah harus memiliki metode ilmu itu juga merupakan satu proses. Bahkan merupakan satu proses yang terus-menerus atau berkembang. Maka pembahasan metode ilmu atau metode keilmuan akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

C. Metode dan Kebenaran Ilmu

Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, dengan kata lain pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang kait-mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan

sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah, maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang *reliable*. Penalaran induktif adalah penalaran yang berpangkal tolak dari primis yang bersifat individual atau proposisi atomik. Penalaran induktif ini bertolak dari premis yang khusus disintesisasikan untuk diambil satu kesimpulan yang bersifat umum (Mintaredja, 1997: 22).

Jujun Suriasumantri (1981: 10-12), juga menekankan adanya pemakaian model pemikiran secara rasional dan pemikiran secara empiris dalam metode keilmuan. Menurutnya, berpikir secara rasional yang berdasarkan paham rasionalisme, sebenarnya ide tentang kebenaran sudah ada. Pikiran manusia dapat mengetahui ide tersebut, namun tidak menciptakannya, dan tidak pula mempelajarinya lewat pengalaman. Dengan demikian ide tentang kebenaran yang menjadi dasar pengetahuan diperoleh lewat berpikir secara rasional, terlepas dari pengalaman manusia. Sistem pengetahuan dibangun secara koheren di atas landasan pernyataan yang sudah pasti.

Menurut model pemikiran empirisisme, pengetahuan ini tidak ada secara apriori di benak manusia, tetapi harus diperoleh dari pengalaman. Gabungan antara pendekatan rasional dan empiris dinamakan metode keilmuan. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis. Sedangkan empirisisme kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Kedua metode ini yang dipergunakan secara dinamis menghasilkan pengetahuan yang konsisten sistematis serta dapat diandalkan, sebab pengetahuan tersebut telah teruji secara empiris (Suriasumantri, 1981: 12).

Jelaslah bahwa dalam metode ilmu ini, pendekatan rasional yang dilengkapi dengan pendekatan empiris. Sebab bagaimana pun penjelasan yang bersifat rasional yang diberikan baru merupakan satu hipotesis atau dugaan, sepanjang belum teruji secara empiris. Jika pengujian secara empiris mendukung maka hipotesis tadi benar secara keilmuan. Sebaliknya, hipotesis akan ditolak jika pengujian empiris tidak mendukungnya.

Saling keterkaitan antara model berpikir rasional dan empiris atau deduktif dan induktif tersebut tercermin dalam langkah metodis ilmiah. Menurut Abbas Hamami Mintaredja (1997: 23), langkah metodis ilmiah itu meliputi penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, perumusan hipotesis, verifikasi hipotesis, dan teori ilmiah.

Penentuan masalah merupakan kegiatan yang secara sadar menetapkan masalah yang akan ditelaah dengan ruang lingkup dan batasnya. Tanpa kejelasan ini akan ditemukan kesukaran dalam langkah selanjutnya. Dalam penetapan kerangka masalah, mendeskripsikan masalah secara lebih jelas. Dalam langkah ini dideskripsikan berbagai faktor yang terlibat dalam masalah tersebut. Faktor itu membentuk satu kerangka masalah yang berwujud gejala yang sedang ditelaah.

Perumusan hipotesis, kegiatan ini merupakan usaha untuk memberikan penjelasan sementara tentang hubungan sebab akibat yang mengikat faktor yang membentuk kerangka masalah yang dihadapi sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya.

Tentang verifikasi hipotesis, kegiatan ini merupakan usaha untuk mengumpulkan fakta atau data sebagaimana yang dihadapi dalam masalah. Akhirnya, hipotesis yang telah terbukti kebenarannya merupakan pengetahuan baru dan diterima sebagai bagian dari ilmu. Bahkan masuk sebagai teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan bagian dari satu ilmu, karena teori itu merupakan penemuan baru dari penelitian yang secara cermat sudah terbukti kebenarannya.

Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif, maksudnya betul-betul didukung oleh fakta kenyataan. Dalam proses untuk mencapai kebenaran tersebut, ilmu tidak hanya memakai teori kebenaran korespondensi saja melalui pemikiran empirisnya, tetapi juga menerapkan teori kebenaran koherensi melalui pemikiran rasionalnya. Hal ini tampak dalam langkah yang sudah diuraikan di atas. Selain dari pada itu, kebenaran dalam ilmu juga merupakan hasil persetujuan (konvensional) dari para ilmuwan yang pada umumnya terdiri atas para sarjana. Oleh karena itu, kebenaran ilmu bersifat universal sejauh ilmu itu dapat dipertahankan kebenarannya. Kebenaran ilmu karena merupakan kesepakatan, keuniversalan itu masih terbatas dalam arti bahwa jika satu saat

dapat menunjuk kebenaran baru maka kebenaran lama diganti oleh penemuan baru itu.

Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Melalui metode ilmiah yang telah baku sesuai dengan sifat dasar dari masing-masing ilmu dihasilkanlah teori ilmiah yang telah teruji kebenarannya. Setiap ilmu secara tegas menetapkan jenis objek secara ketat, apakah objek itu bersifat abstrak atau konkret sesuai dengan sikap ontologis yang mendasarinya, serta menetapkan langkah ilmiah sesuai dengan objek khas yang dihadapi (Mintaredja, 1997: 24). Mengacu pada status ontologis objek, maka pada dasarnya kebenaran dalam ilmu dapat digolongkan dalam dua jenis teori kebenaran korespondensi dan teori kebenaran koherensi. Ilmu kealaman pada umumnya menuntut kebenaran korespondensi, karena fakta objektif amat dituntut dalam pembuktian terhadap proposisi, tetapi juga tidak terlepas sama sekali dari teori koherensi, misalnya dari perumusan masalah sampai hipotesis. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu kemanusiaan, ilmu sosial, sejarah. Ilmu ini menuntut koherensi di antara proposisinya, tetapi juga tidak dapat melepaskan secara bebas begitu saja dari teori kebenaran korespondensi.

Kebenaran ilmiah walaupun bersifat universal, tetapi juga relatif. Karena sifat kebenaran ilmiah itu merupakan terminal. Artinya jika satu saat dihasilkan penemuan baru atau teori baru, maka teori lama telah dianggap gugur. Dengan demikian kebenaran ilmiah juga dihadapkan pada prospek ilmu. Bahwa setiap ilmu selain untuk mencapai kebenaran yang objektif, juga selalu memperhitungkan masa depan. Perhitungannya adalah tentang kemungkinan yang akan terjadi yang berupa perkembangan, baik berupa penyempurnaan maupun melengkapi teori yang sudah ada, bahkan mungkin mengganti dengan teori yang baru sama sekali.

D. Pancasila sebagai Sistem Ilmiah dan sebagai Sistem Filsafat

Terlebih dahulu akan dibahas tentang Pancasila sebagai sistem ilmiah. Menurut Poedjawijatna dalam bukunya *Tahu dan Pengetahuan* sebagaimana dikutip oleh Kaelan (1995: 13-14), sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenaran harus bersifat universal. Pancasila sebagai sistem ilmiah memenuhi syarat ini yang akan diuraikan di bawah ini.

Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan, bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Atau dengan perkataan lain, objek material Pancasila adalah segala unsur, nilai yang secara konkret tercermin pada bangsa Indonesia, berupa kepribadian, sifat, karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Objek formal Pancasila adalah berupa pelaksanaan Pancasila dalam praktek kenegaraan secara resmi, segi yuridis kenegaraan.

Sistem ilmiah harus bermetode. Dalam hal ini, metode merupakan satu cara pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila, baik objek formal maupun material, sehingga mencapai kebenaran. Menurut Notonagoro, metode yang digunakan dalam pendekatan Pancasila adalah analitiko-sintesis. Dengan menganalisis objek tersebut diambil satu sintesis untuk dapat merumuskan secara umum, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman.

Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematis. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interelasi maupun interdependensi. Secara keseluruhan jelas bahwa Pancasila membentuk satu sistem, bahwa setiap sila tidak berdiri sendiri-sendiri, terpisah antara sila yang satu dengan sila yang lain. Keseluruhan sila merupakan satu kebulatan yang utuh sebagai dasar negara. Walaupun Pancasila terdiri atas lima sila, tetapi sebagai satu kesatuan tetap mengabdikan pada tujuan yang satu, yakni kelima sila sebagai dasar negara dipakai untuk landasan mewujudkan masyarakat adil-makmur, material-spiritual yang berdasarkan Pancasila.

Akhirnya, Pancasila sebagai sistem ilmiah juga memiliki sifat kebenaran yang universal. Kebenaran satu ilmu harus universal, artinya berlaku sembarang tempat, ruang, dan waktu. Sebenarnya hakikat kebenaran rumusan Pancasila adalah bersifat universal, yaitu unsur Pancasila adalah bersifat abstrak, umum, dan universal.

Sekarang akan dibahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut: objek filsafat bersifat menyeluruh, artinya tidak berupa hal khusus

tertentu, sistem filsafat harus bersifat koheren, metodenya bersifat mendasar atau sampai ke hakikatnya, dan kadar kebenarannya bersifat spekulatif. Atau dengan kata lain, sistem filsafat itu merupakan satu bagan konsepsional yang bersifat rasional yang mempunyai ciri bersifat menyeluruh, koheren, mendasar, dan spekulatif (Bakry, 1994).

Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat konsepsional. Menurut Kattsoff (1996: 7), konsepsi ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Menurut Notonagoro, bahan Pancasila diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia (Suhadi, 1980: 12). Bagan konsepsional dalam sistem filsafat Pancasila ini juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan secara logis.

Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila di dalamnya telah tersusun satu pola yang dapat mawadahi semua persoalan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai objek menyeluruh, mencakup semua permasalahan hidup manusia, yakni: masalah hidup menghadapi diri sendiri, masalah hidup menghadapi sesama manusia, dan masalah hidup menghadapi Tuhan (Bakry, 1994: 14).

Sistem filsafat harus bersifat koheren. Bahwa bagan konsepsional tersebut berhubungan satu dengan lainnya secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Demikian pula dengan Pancasila, bagian-bagiannya saling melengkapi, setiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Penjabaran nilai Pancasila juga bersifat runtut, tidak ada penjabaran Pancasila yang bertentangan dengan konsep dasar sebagai nilai yang diyakini kebenarannya.

Metode dalam sistem filsafat mendasar, yakni mendalam sampai ke inti mutlak dari permasalahannya sehingga merupakan hal yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan atas dasar inti mutlak tata kehidupan manusia dalam rangka menghadapi diri sendiri, menghadapi sesama manusia, dan menghadapi Tuhan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif, yakni merupakan hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal serta pangkal tolak pemikiran atas sesuatu hal. Sistem filsafat Pancasila pada permulaannya merupakan hasil pemikiran dari para tokoh kenegaraan yang merupakan satu pola dasar sebagai titik awal yang kemudian dibuktikan kebenarannya.

Jelaslah bahwa sistem filsafat Pancasila bersifat koheren, dalam hubungan antar bagian dan pernyataannya. Bersifat menyeluruh, meliputi semua tata kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Bersifat mendasar sampai ke inti mutlak tata kehidupan. Bersifat spekulatif, merupakan praanggapan sebagai hasil perenungan pada awalnya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Sehingga perlu digali lagi berbagai kemungkinan sumbangan Pancasila bagi kemajuan dunia ilmiah dan kefilosofan.

E. Sistem Kefilsafatan Pancasila Notonagoro

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa sistem filsafat itu merupakan bagan konseptual yang bersifat rasional, yang mempunyai ciri: objeknya bersifat menyeluruh, koheren, mendasar, dan spekulatif. Pemikiran Notonagoro tentang Pancasila, jika dikaji juga merupakan satu sistem kefilosofan, sehingga dapat disebut sebagai sistem kefilosofan Pancasila Notonagoro. Berikut ini akan diuraikan bahwa pemikiran Notonagoro tentang Pancasila tersebut merupakan satu sistem filsafat.

Sistem filsafat Pancasila merupakan satu bagan konseptual. Menurut Kattsoff (1996: 7), konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Notonagoro diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia (Suhadi, 1980; 12). Bagan konseptual dalam sistem filsafat Pancasila juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan secara logis.

Menurut Notonagoro pengertian hakikat abstrak ini dimungkinkan, bahkan seharusnya pada rumusan sila Pancasila. Rumusan sila Pancasila terdiri atas kata pokok dan kata sifat. Kata pokoknya terdiri atas kata dasar, yaitu: Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Empat sila dibubuhi awalan ke-an dan satu per-an, hal ini menjadikan abstrak kata dasarnya. Pengertian ini disebut pengertian abstrak umum universal. Isinya sedikit, luasnya tidak terbatas. Artinya, meliputi segala hal dan keadaan bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu tidak terbatas (Soeprapto, 1995: 31). Tuhan, manusia, satu dan adil merupakan ada senyatanya. Sehingga ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan abstraksi serta generalisasi dari kenyataan yang sesungguhnya. Masing-masing abstraksi tersebut tidak terpisah-pisah, tetapi berhubungan secara logis sehingga bersifat rasional.

Objek filsafat bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila dapat mewadahi semua permasalahan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Menurut Notonagoro, antara landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Dengan demikian secara tegas dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia tentang Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil (Mudhofir, 1996: 13). Dengan demikian, Pancasila memuat semua permasalahan manusia secara menyeluruh, yang meliputi: terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan terhadap yang ada di luar dirinya. Di sini pemikiran Notonagoro juga memenuhi kriteria sebagai sistem filsafat, karena juga bersifat menyeluruh, objeknya mencakup semua hal.

Kemudian sistem filsafat harus bersifat koheren. Bahkan bagan konsepsional tersebut berhubungan satu dengan lainnya secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Menurut Notonagoro (1975: 19), Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan, tersusun atas berbagai bagian yang tidak saling bertentangan. Semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Selain itu, setiap sila Pancasila di dalamnya mengandung sila lainnya. Terdapat hubungan saling mengkualifikasi. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Begitu seterusnya dengan sila yang lain. Hubungan yang runtut dan koheren, juga tercermin dalam susunan Pancasila yang menurut Notonagoro bersifat hirarkhis dan berbentuk piramidal (Suhadi, 1980: 14). Artinya kelima sila Pancasila itu

menunjukkan satu rangkaian bertingkat yang tidak boleh dibolak-balik. Hal ini juga menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Setiap sila yang ada di belakang sila lainnya lebih sempit cakupannya tetapi lebih banyak isi sifatnya.

Tentang sistem filsafat Pancasila harus bersifat mendasar. Bahwa di dalam filsafat Pancasila dibahas sampai hal yang mendasar, sampai ke hakikatnya sehingga sampai pada inti mutlaknya. Menurut Notonagoro hubungan antara negara Indonesia dengan landasan sila-sila Pancasila (yaitu: Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil) merupakan hubungan kesesuaian yang merupakan keharusan. Maka arti dan isi setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut: Ketuhanan ialah sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat Tuhan; Kemanusiaan ialah sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat manusia; Persatuan ialah sifat keadaan negara yang sesuai dengan hakikat satu; Kerakyatan ialah sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat rakyat; Keadilan ialah sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat adil. Menyimak hal ini, maka pembahasan filsafat Pancasila itu tentang hal yang mendasar, sampai kepada hakikatnya; hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil.

Sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif. Sistem filsafat merupakan hasil pemikiran yang masih merupakan pola dasar sebagai titik awal yang kemudian dibuktikan kebenarannya. Merupakan praanggapan sebagai hasil perenungan pada awalnya. Dalam filsafat Pancasila Notonagoro, hal ini menyangkut rumusan isi arti Pancasila yang kefilosofan dari sila kesatu sampai sila kelima. Refleksi kefilosofan yang dikembangkan Notonagoro untuk mengerti hakikat sila Pancasila kemudian dijadikan pangkal tolak pengamalan objektif dan pengamalan subjektif.

F. Teori Kebenaran Pancasila

Dalam lingkup perbincangan kefilosofan, sistem filsafat Pancasila harus memenuhi tiga teori kebenaran, yakni teori kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Sehingga sistem filsafat Pancasila menjadi tangguh di hadapan sistem filsafat yang lain.

1. Teori koherensi

Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Menurut Notonagoro (1975: 19), Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan, tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Setiap bagian Pancasila merupakan bagian yang mutlak, jika dihilangkan satu bagian saja hilanglah halnya, sebaliknya terlepas dari halnya, bagian tersebut dihilangkan kedudukan dan fungsinya. Selain itu, setiap sila Pancasila di dalamnya mengandung sila yang lainnya. Terdapat hubungan yang saling mengkualifikasi. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan. Begitu seterusnya dengan sila yang lain pula. Hubungan satu kesatuan dan saling mengkualifikasi ini terjadi karena tidak ada pertentangan sila yang satu dengan sila yang lainnya, hubungan sila kesatu sampai sila kelima bersifat runtut. Inilah satu penerapan teori koherensi.

Hubungan logis sebagai pengakuan atau cerminan teori koherensi terlihat pada susunan Pancasila yang menurut Notonagoro bersifat hirarkhis dan berbentuk piramidal (Suhadi, 1980: 14). Artinya, kelima sila Pancasila itu menunjukkan satu rangkaian yang bertingkat, sehingga tidak boleh dibolak-balik tata urutannya. Hal ini juga menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Setiap sila yang ada di belakangnya lebih sempit cakupannya tetapi lebih banyak isi sifatnya.

Selain itu, hubungan konsistensi ini terlihat pada Pancasila sebagai aksioma kemudian diturunkan keempat pokok pikiran sebagai teorema, dan selanjutnya diturunkan ke pasal UUD 1945. Dalam penjabaran ini telah terbukti bahwa pasal-pasal UUD 1945 konsisten dengan empat pokok pikiran, dan empat pokok pikiran konsisten dengan Pancasila (Bakry, 1994: 47). Jelaslah bahwa

sistem filsafat Pancasila mengakui dan menerapkan teori kebenaran koherensi.

2. Teori korespondensi

Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, berkepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa dan pedoman hidup bangsa. Hal ini benar jika sesuai dengan kenyataan sehari-hari (Bakry, 1994: 49). Hal ini tepat pendapat Notonagoro (1975: 17), bahwa bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tri-prakara, yakni Pancasila adat kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Kenyataan ini bisa dilihat dalam dinamika hidup sehari-hari masyarakat dan bangsa Indonesia.

Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal dapat menjadi sumber landasan pemecahan masalah kenyataan hidup sehari-hari. Menurut Notonagoro, ada hubungan yang mutlak antara Pancasila dengan bangsa Indonesia, yaitu hubungan sebab-akibat (Soeprapto, 1994: 53). Segala sesuatu mulai dari kepribadian bangsa dan kehidupan bermasyarakat harus sesuai dengan hakikat yang terdapat dalam sebabnya. Maka kebenaran menurut sistem filsafat Pancasila, bahwa kandungan pernyataan sila-sila Pancasila harus cocok, sesuai, terjelma dalam keadaan senyatanya bermasyarakat dan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila berkesuaian atau koresponden dengan objek yang dituju.

3. Teori pragmatik

Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berfungsi secara praktis. Fakta sejarah telah membuktikan, baik sejak proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara maupun dalam menghadapi berbagai pemberontakan, dengan jiwa Pancasila ini persatuan dan kesatuan tetap terjaga (Bakry, 1994: 49). Para penganut Pancasila percaya akan kebenaran Pancasila, karena Pancasila bersifat fungsional dalam mempersatukan bangsa Indonesia.

Jika dilihat dari segi historis, Pancasila juga memiliki fungsi praktis. Hal ini karena Pancasila merupakan jawaban atas pertanyaan esensial dalam sidang BPUPK dan PPKI; “Jika negara kita merdeka, maka apa dasarnya?”, apa landasan yang mau dipakai. Analisis empat kausalitas Aristoteles dari Notonagoro kiranya membuktikan fungsi praktis ini. Salah satu relasi kausalitas tersebut adalah kausa finalis. Kausa finalis Pancasila adalah sebagai dasar kefilosofan negara atau dasar negara Indonesia merdeka. Proposisi-proposisi dalam sistem filsafat Pancasila terlihat kemanfaatannya sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya proposisi yang koheren dan koresponden dengan kenyataan saja.

Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan, di dalam diri Pancasila juga mengandung persatuan dan kesatuan. Jika di dalam diri Pancasila mengandung tiga teori kebenaran: kohertensi, korespondensi, dan pragmatik; maka konsekuensinya menurut Pancasila pernyataan atau proposisi benar jika runtut, konsisten, sesuai dengan kenyataan dan sekaligus membawa kefaedahan. Ketiga teori tersebut menurut Pancasila tidak dipertentangkan tetapi saling melengkapi. Dalam hal saling melengkapi itu, mengikuti asas hirarkhis-piramidal dan saling mengkualifikasi dalam Pancasila dengan urutan: koherensi, korespondensi dan pragmatik.

G. Kebenaran Ilmu Berdasar Teori Kebenaran Pancasila

Manusia tidak pernah puas terhadap pengetahuan yang telah diperolehnya dalam arti pengetahuan sehari-hari yang tidak membawa perubahan yang besar. Dengan demikian manusia hanya merasa bahwa pengetahuan adalah sub kelas dari kepercayaan yang benar dan selalu benar. Oleh karena itu manusia ingin mencari kepuasan melalui pembahasan yang lebih mendalam terhadap adanya gejala yang ajeg. Dalam hal ini manusia merasa bahwa ilmu adalah sesuatu yang merupakan hasil usaha manusia untuk memperadab dirinya (Mintaredja, 1983: 65). Dalam rangka memenuhi hasrat ingin tahunya, manusia merasa bahwa dengan ilmu akan memperoleh kebenaran yang lebih meyakinkan daripada kebenaran lewat pengetahuan biasa saja.

Kelebihan ilmu di antaranya terletak pada pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis serta telah teruji kebenarannya. Melalui beberapa langkah dalam metode keilmuan, dari perumusan

masalah sampai penemuan teori ilmiah, ilmu berhasil menetapkan kebenaran ilmiah. Pada dasarnya kebenaran dalam ilmu meliputi dua jenis teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Teori koherensi tampak dalam langkah metode ilmiah: dari penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, dan hipotesis. Teori korespondensi tampak dalam langkah metode ilmiah selanjutnya, yakni: verifikasi hipotesis sampai pada teori ilmiah.

Namun atas dasar kelebihan ilmu seperti telah diuraikan di atas, masih juga terdapat berbagai kekurangan ilmu. Kekurangan ini bersumber pada asumsi landasan epistemologi ilmu, yang menyatakan bahwa manusia mampu memperoleh pengetahuan yang bertumpu pada persepsi, ingatan dan penalaran, berpikir secara rasional dan empiris dengan teori koherensi dan korespondensi. Persepsi yang mengandalkan panca indera jelas ada kelemahannya, karena panca indera tidak sempurna. Demikian juga ingatan kurang dapat dipercaya, begitu juga mengandalkan penalaran dari rasio semata juga jelas mempunyai kelemahan untuk mencapai kebenaran (Suriasumantri, 1981: 17).

Penjelajahan ilmu untuk mencapai kebenaran hanya membatasi gejala empiris. Tetapi sebenarnya aspek kehidupan secara keseluruhan bersifat kompleks dan tidak semata-mata bersifat empiris. Menurut Jujun (1981: 18), manusia perlu berpaling kepada metode dan teori lain. Bahkan dalam ruang lingkup empiris ini pun masih banyak segi kehidupan yang belum terjangkau.

Dari kenyataan di atas, ternyata dalam penjelajahan manusia untuk mencapai kebenaran secara ilmiah berada dalam tahap yang awal sekali. Maka teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefilosofannya perlu ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu. Bahwa kebenaran ilmu itu tidak hanya gabungan teori koherensi dan korespondensi serta kesepakatan (konvensional) dari para ahlinya saja. Tetapi masih ditambah, menurut Pancasila kebenaran ilmu juga dikembalikan kepada manusianya, kefaedahannya bagi umat manusia. Jadi, kebenaran ilmiah itu menurut teori kebenaran Pancasila: koheren, di antara berbagai konsep yang runtut, konsisten, koresponden, keseusian antara konsep dan dunia empiris, dan berfaedah bagi manusia.

H. Pengembangan Ilmu di Indonesia

Di atas sudah dikemukakan, bahwa penjelajahan manusia untuk mencapai kebenaran yang bersifat ilmiah baru dalam taraf yang sangat awal sekali. Maka tidak mengherankan, setelah mereguk dengan puas segenap pengetahuan ilmiah. Doktor Faust sebagaimana dikutip oleh Jujun Suriasumantri (1981: 18) mengatakan :

“Nah si tolol malang, dengan pengetahuanmu kau tetap segoblok seperti sebelumnya ...” hal ini menunjukkan, dalam perkembangannya ilmu masih perlu adanya pembenahan, masukan teori baru yang memungkinkan melihat dunia kenyataan, tidak melulu dari segi pemikiran rasional dan empiris semata, dari segi pola pikir deduksi dan induksi saja.

Berkaitan dengan pengembangan ilmu, kebenaran ilmiah dihadapkan dengan prospek ilmu. Setiap ilmu selain untuk mencapai kebenaran objektif, juga selalu memperhitungkan masa depan. Perhitungan ini berkaitan dengan kemungkinan untuk pengembangan, baik berupa penyempurnaan maupun melengkapi teori yang sudah ada, bahkan dapat saja mengganti dengan teori yang baru sama sekali.

Dalam hal ini pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Teori kebenaran Pancasila seperti sudah dikemukakan di atas dipakai untuk melengkapinya, hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu, lebih-lebih pengembangan dan masa depan ilmu di Indonesia.

Seperti telah diketahui, bahwa ilmu untuk mencapai kebenaran melalui langkah metodenya, yakni: penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, perumusan hipotesis, verifikasi hipotesis, dan teori ilmiah. Bagi pandangan teori kebenaran Pancasila, kebenaran teori ilmiah (kebenaran yang ingin dicapai oleh ilmu) seharusnya bukan hanya semata-mata memenuhi kriteria koheren, dan korespondensi saja, tetapi juga sekaligus pragmatis, berfaedah bagi manusia. Dengan kata lain kebenaran ilmiah itu harus sudah menunjukkan dan tahan uji terhadap tiga teori kebenaran sekaligus (koheren, korespondensi dan pragmatis) secara simultan, terkait. Teori ilmiah itu benar bukan saja memenuhi kaidah deduksi-induksi, koheren-korespondensi saja tetapi sekaligus kaidah pragmatis, artinya bermanfaat bagi manusia.

Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada kriterianya untuk mengukur segi kebenarannya. Menurut teori kebenaran Pancasila: kriteria koherensi, artinya harus runtut, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kriteria korespondensi, bahwa pernyataan atau proposisi harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Kriteria pragmatis, artinya kefaedahannya yang selalu dikembalikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai kebenaran inilah yang seharusnya dipakai sebagai dasar dalam rangka mengembangkan ilmu di Indonesia. Sehingga ilmu yang dikembangkan di Indonesia ini tidak akan ada alienasi terhadap bangsa Indonesia, tetapi sepenuhnya cocok dan sejalan dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia.

I. Penutup

Ilmu dengan metode ilmiahnya bertujuan untuk mencapai kebenaran. Karena yang berilmu itu manusia, maka kebenaran semata-mata tidak hanya murni memenuhi kriteria koherensi-korespondensi, deduksi-induksi, pemikiran rasional-empiris saja. Tetapi kebenaran juga harus dikembalikan pada manusianya. Pengembangan ilmu di Indonesia juga harus dikembalikan pada manusia Indonesia, jati diri bangsa Indonesia.

Teori kebenaran Pancasila menghendaki, bahwa kebenaran ilmiah itu sekaligus memenuhi kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Ketiga hal tersebut secara simultan saling melengkapi dalam kerja ilmiah. Artinya tidak menonjolkan atau mementingkan salah satunya.

Untuk pengembangan ilmu di Indonesia nilai kebenaran Pancasila harus dijadikan dasarnya. Bagi Pancasila kebenaran ilmiah harus koheren dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan; harus berkesesuaian dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil; serta secara pragmatik ukuran kemanfaatannya harus dikembalikan pada kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

Jika sekiranya teori kebenaran Pancasila ingin dikembangkan, dikaji, dan diuji lebih lanjut, maka seyogyanya

tidak sebatas pada kebenaran serta pengembangan ilmu saja. Tetapi perlu dikaji dan dikaitkan lagi dengan kebenaran dan pengembangan teknologi. Sebab seperti sudah diketahui di samping ilmu, teknologi lebih terasa kehadirannya termasuk bagi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Hamami Mintaredja, 1983, **Epistemologi**, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.

-----, 1997, **Landasan Epistemologi Ilmu**, Makalah Internship Dosen-dosen Filsafat Ilmu se Indonesia, 21 September s/d 5 Oktober 1997, Kerjasama Fakultas Filsafat UGM dengan Dirjen Dikti Republik Indonesia, Yogyakarta.

Jujun Suriasumantri, 1981, "Tentang Hakekat Ilmu: Sebuah Pengantar Redaksi" dalam Jujun Suriasumantri, **Ilmu Dalam Perspektif**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kaelan, 1995, **Pancasila Yuridis Kenegaraan**, Paradigma, Yogyakarta.

Kattsoff Louis O., **Element of Philosophy**, Alih Bahasa Soejono Soemargono, Pengantar Filsafat, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Noor MS. Bakry, 1994, **Orientasi Filsafat Pancasila**, Liberty, Yogyakarta.

Notonagoro, 1975, **Pancasila Secara Ilmiah Populer**, Pantjuran Tujuh, Jakarta.

Runes, Dagobert D., (ed), 1975, **Dictionary of Philosophy**, Totawa, Littlefield, Adams.

Soejono Soemargono, 1983 a, **Ilmu dan Kebenaran” dalam Beberapa Pemikiran Kefilsafatan**, Fak. Filsafat UGM, Yogyakarta.

-----, 1983, b, **Filsafat Ilmu**, Nur Cahaya, Yogyakarta.

Sri Soeprapto, 1994, **Hand Out Filsafat Pancasila**, Program Studi Ilmu Filsafat Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

-----, 1995, “**Aktualisasi Nilai-nilai Filsafat Pancasila Notonagoro**”, dalam Jurnal Filsafat, seri 22 Agustus 1995.

Suhadi, 1980, **Rafila**, Tiga Serangkai, Solo.

Ziman John, 1988, “Hakekat Ilmu” dalam C.A. Qadir (penyunting), **Ilmu dan Metodenya**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.